**SEJARAH PANCASILA (Lanjutan)**

**A. Sejarah Lahirnya Pancasila**

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan salah satu tonggak sejarah terpenting negara ini. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Belanda adalah negara yang paling lama menduduki dan menjajah Indonesia. Kita Ketahui sebelum kedatangan penjajah asing, terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka di wilayah Nusantara, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut, bangsa Indonesia melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan senjata maupun perlawanan politik.

Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Masuknya Jepang pada awalnya mendapat respon positif dari rakyat Indonesia karena Jepang masuk ke Indonesia dengan menjanjikan akan memberikan kemeredekaan terhadap Indonesia. Namun semua janji tersebut tidak ditepati oleh Jepang yang kemudian bahkan menjajah Indonesia dengan sangat kejam.

Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah perang melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang kembali memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tangga l7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat *Gunseikan* (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura).

1. **Pembentukan BPUPKI (*Dokuritsu Junbi Cosakai*)**

Dalam Maklumat *Gunseikan* sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.



|  |  |
| --- | --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* | 1 |

*Pendidikan Pancasila*

**

Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, diantaranya adalah Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan usulan mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemudian Pada Tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo menyampaikan usulan mengenai

Dasar Negara Indonesia, yaitu :

1. Teori negara perseorangan
2. Paham negara kelas
3. Paham negara Integralistik

Selanjutnya dalam kaitannya dengan falsafah negara Indonesia, Soepomo mengusulkan :

1. Negara nasional yang bersatu
2. Dianjurkan supaya warga negara untuk tunduk kepada Tuhan
3. Dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk system badan permusyawaratan



|  |  |
| --- | --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* | 2 |

*Pendidikan Pancasila*

**

1. Ekonomi bersifat kekeluargaan
2. Dan mengenai hubungan antar bangsa menganjurkan upaya-upaya Indonesia bersifat Asia Timur Raya

Pada Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato yang oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat (mantan Ketua BPUPK) berjudul “lahirnya Pancasila” menyampaikan usulan Dasar negara Indonesia , yaitu :

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme ( peri kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Lebih lanjut Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:

1. Sosio Nasionalisme
2. Sosio Demokrasi
3. Ketuhanan

Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.

Kutipan Pidato Soekarno :

*“…Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi..”*

Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:



|  |  |
| --- | --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* | 3 |

*Pendidikan Pancasila*

**

1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H Wachid Hasyim
4. Mr. M. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. M. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. M. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Mudzakir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. M. Yamin

Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.

Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama (1)



|  |  |
| --- | --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* | 4 |

*Pendidikan Pancasila*

**

mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ada utusan dari Indonesia bagian timur yang mengutusnya.

Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.

